



Pemerintah Kabupaten Nunukan

Rencana Kerja 2026



Inspektorat Daerah
Kabupaten Nunukan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Rencana Kerja 2026 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun ke depan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Nunukan, 20 Mei 2025

Plt. Inspektur,

Pirdaus, S. Hut, M. AP
Pembina Tk. I
NIP. 19710525 200112 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	30
3.2. Program dan Kegiatan	30
BAB. IV PENUTUP	41

Daftar tabel

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan capaian renstra Sampai dengan tahun berjalan
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan adanya perencanaan yang selaras dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan satu dokumen perencanaan Perangkat daerah periode satu tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Perangkat daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antar program, kegiatan, lokasi, sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana kerja dengan Rencana strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah rencana kerja pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dasar penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Nunukan adalah Rencana Strategis SKPD yang mengacu pada Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan mengacu pada Rencana strategis tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata cara Perencanaan,, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target serta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja

inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dibidang pengawasan satu tahun kedepan. Adapun tujuan dari Penyusunan Renja sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.
2. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.
3. Merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja.
4. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah
5. Memproyeksikan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya.
6. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 (n-3), tahun 2024 (n-2) dan tahun 2025 (n-1) dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2025 (tahun berjalan), serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya.

Untuk pelaksanaan Renja Tahun 2025 atau tahun (n-1) merupakan masa transisi antara renstra 2021-2026 dengan renstra periode 2025 – 2029, dan realisasi kinerja disajikan Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 triwulan pertama, pada umumnya realisasi program/kegiatan belum sesuai dengan target kinerja akhir renstra yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra Periode 2021-2026 akan disajikan dalam tabel 2.1 .

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025(tahun berjalan)
Kabupaten Nunukan

Lembar Dari

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Usuran Pemerintahan									
	Unsur Pengawasan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100persen	100	100	100	100	100	100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang tersedia	46	9	9	9	100	9	27	58.70

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dok	6	3	3	100	3	12	75.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30laporan	12	6	6	100	6	24	80.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan	5unit	5	5	5	100	5	5	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	45orang	45	45	46	102.2222	45	46	102.22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	5unit	5	5	5	100	5	5	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31orang	44	6	42	700	6	92	296.77
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5unit	5	5	5	100	5	5	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5paket	21	1	6	600	1	28	560.00

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5unit	19	1	11	1100	1	31	620.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5paket	2	1	2	200	1	5	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100laporan	65	20	37	185	20	122	122.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5dokumen	0	0	0	0	0	0	0.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	4unit	2	0	0	0	0	0	0.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4unit	2	0	0	0	0	0	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5unit	5	5	5	100	5	5	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20laporan	8	4	4	100	4	16	80.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20laporan	8	4	4	100	4	16	80.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20laporan	8	4	4	100	4	16	80.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik Daerah	5Unit	5	5	5	100	5	5	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13Unit	13	13	16	123.0769	13	7	53.85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT	100persen	100	100	100	100	100	100	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90persen	67.14	84	76,71	91,32	87	87	96.67
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	980laporan	417	196	261	133.1633	196	874	89.18
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	170laporan	83	34	31	91.18	34	148	87.06
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	160laporan	82	32	35	109.375	32	149	93.13
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	340laporan	147	68	122	179.41	68	337	99.12
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	280laporan	93	56	67	119.64	56	216	77.14
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30dokumen	12	6	6	100	6	24	80.00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75laporan	20	15	20	133.33	15	55	73.33

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	75laporan	36	15	20	133.33	15	71	94.67
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan SPIP	90persen	64	80	64	80.00	90	90	100.00
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	45PD	32	34	34	100	31	40	88.89
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45PD	34	37	50	135.14	31	34	75.56
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31PD	32	31	50	161.29	31	32	103.23
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25kegiatan	10	5	1	20	5	16	64.00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4PD	2	8	8	100	4	4	100.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa catatan umum capaian kinerja tahun berjalan 2025 antara lain:

Capaian kinerja tahun berjalan 2025 Berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya peran pengawasan Internal dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)” yang dijabarkan dalam sasaran strategis dengan uraian indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah”, indikator :

- Persentase tindak lanjut hasil temuan
- Indeks Manajemen Resiko (MR).
- Peningkatan Kapabilitas APIP

capaian kinerja mulai tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pecapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Nunukan

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n - 2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
I.	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang di susun			9	9	9	9	9	9	9	9	
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	3	3	4	3	3	3	4	
1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6	6	6	6	6	6	6	6	
2	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan			5	5	5	5	5	5	5	5	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45	45	45	43	46	45	45	
3	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawain			5	5	5	5	5	5	5	
3.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			7	6	6	27	42	6	6	
4	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran			5	5	5	5	5	5	5	
4.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	1	20	6	1	1	kemungkinan realiasi akan melebihi target, terkait sitem pengadaan melalui e-katalog dan banyaknya peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pengawasan
4.2	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	1	18	11	1	1	
4.3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	1	1	1	2	1	1	

1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
4.4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD			20	20	20	20	41	37	20	20	
4.5	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0	0	0	0	0	0	1	1	
5	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			2	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2	0	0	0	0	0	0	0	
6	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5	5	5	5	5	5	5	5	
6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
6.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
7	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik Daerah			5	5	5	5	5	5	5	5	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			13	13	13	13	16	13	13	
7.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12	12	12	0	0	12	12	
II	Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT			100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti			80	82	84	69.82	91,32	82	84	
1	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			196	196	196	231	261	196	196	
1.1	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			34	34	34	35	31	34	34	
1.2	Jumlah laporan hasil reviu kinerja			32	32	32	44	35			
1.3	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan			68	68	68	89	122	68	68	kemungkinan realiasi akan melebihi target, terkait bertambahnya tugas mandatori
1.4	Jumlah laporan pengawasan desa			56	56	56	57	67	56	56	

1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
1.5	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			6	6	6	6	6	6	6	6	
2	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			15	15	15	15	16	20	15	15	
2.1	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			15	15	15	15	16	20	15	15	
III	Persentase PD yang menerapkan SPIP			60	70	80	80	64	100	80	80	
1	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi			31	34	37	37	34	50	34	37	
1.1	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			31	34	37	37	34	50	34	37	
1.2	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			31	31	31	31	31	50	31	31	
1.3	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			5	5	5	5	5	1	5	5	
1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			2	3	4	8	2	8	3	4	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya pengelolaan administrasi keuangan dan barang daerah serta bidang kepegawaian, sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun pengaduan masyarakat, dengan lebih mengedepankan :

1. Pembinaan dan pengawasan internal.
2. Konsultasi untuk pencegahan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Isu – isu penting yang dihadapi adalah :

1. Masih lemahnya pengendalian intern dari masing – masing unit kerja, implikasinya adalah terjadinya temuan berulang-ulang.
2. Masih belum optimalnya peran Inspektorat, dengan indikasi masih minimnya anggaran pengawasan dan sebahagian masih belum ditindaklanjutinya temuan hasil pengawasan secara sungguh-sungguh.
3. Belum berubahnya *mindset* aparat pengawasan internal pemerintah dari orientasi *financial audit* ke *performance audit*.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

1. Alasan mengenai proses tersebut dilakukan Setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) , Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. Penjelasan tentang proses dan catatan penting.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.
3. Rancangan awal RKPD Tabel
Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.3. berikut :

tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat daerah : Inspektorat						Lembar Dari.....					
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nunukan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	6,664,478,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nunukan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	6,664,478,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah dokumen dan laporan yang tersedia	9	22,167,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah dokumen dan laporan yang tersedia	9	22,167,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	5,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	17,167,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	17,167,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan	5 unit	6,074,487,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan	5 unit	6,074,487,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nunukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	45	6,074,487,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nunukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	45	6,074,487,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	5 unit	204,525,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	5 unit	204,525,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nunukan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	204,525,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nunukan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	204,525,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 unit	241,573,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nunukan	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 unit	241,573,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	18,383,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	18,383,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nunukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	43,276,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nunukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	43,276,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7,853,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7,853,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nunukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	172,061,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nunukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	172,061,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	2 unit	13,010,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	2 unit	13,010,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	13,010,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	13,010,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit	66,145,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit	66,145,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	21,848,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	21,848,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	5,202,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	5,202,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	39,095,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	39,095,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik Daerah	5 unit	42,571,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik Daerah	5 unit	42,571,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit / 6 unit roda empat, 7 unit roda dua	36,329,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit / 6 unit roda empat, 7 unit roda dua	36,329,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	6,242,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	6,242,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nunukan	Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT	100	2,125,330,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nunukan	Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT	100	2,125,330,000	
		Nunukan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	87			Nunukan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nunukan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	196 laporan	1,882,803,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nunukan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	196 laporan	1,882,803,000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Nunukan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 laopran	673,867,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Nunukan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 laopran	673,867,000	
	Reviu Laporan Kinerja	Nunukan	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	32 laporan	65,564,000	Reviu Laporan Kinerja	Nunukan	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	32 laporan	65,564,000	
	Reviu Laporan Keuangan	Nunukan	Jumlah laporan hasil reviu laporan Keuangan	68 laporan	201,312,000	Reviu Laporan Keuangan	Nunukan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	68 laporan	201,312,000	
	Pengawasan Desa	Nunukan	Jumlah laporan pengawasan desa	56 laporan	676,758,000	Pengawasan Desa	Nunukan	Jumlah laporan pengawasan desa	56 laporan	676,758,000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 dokumen	265,302,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 dokumen	265,302,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Nunukan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 laporan	242,527,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Nunukan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 laporan	242,527,000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Nunukan	Jumlah laporang hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 laporan	242,527,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Nunukan	Jumlah laporang hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 laporan	242,527,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nunukan	Persentase PD yang menerapkan SPIP	90	851,200,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nunukan	Persentase PD yang menerapkan SPIP	90	851,200,000	
	Pendampingan dan Asistensi	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	40 PD	851,200,000	Pendampingan dan Asistensi	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	40 PD	851,200,000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 PD	301,243,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 PD	301,243,000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 PD	272,171,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 PD	272,171,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nunukan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	154,500,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nunukan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	154,500,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 PD	123,286,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Nunukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 PD	123,286,000	
	Jumlah				9,641,008,000					9,641,008,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana kerja tahun anggaran 2026 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan yaitu : “ **Meningkatnya peran pengawasan Internal dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**” dan sasaran yaitu : “**Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah**”.

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran., maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi.

Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan dan Sub Kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan dan Sub kegiatan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan dalam Tahun Anggaran 2026 sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g
 - 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- 8 Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - 8.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - 8.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 8.3 Reviu Laporan Kinerja.
 - 8.4 Reviu Laporan Keuangan.
 - 8.5 Pengawasan Desa.
 - 8.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - 9 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 9.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 9.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - 10 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 10.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 10.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 11 Pendampingan dan Asistensi
 - 11.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 11.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - 11.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - 11.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- Keterangan lebih rinci disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun rencana)				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Urusan Pemerintahan									
	Urusan Pemerintahan									
	Urusan Pemerintahan									
x	xx	1	Nunukan	100%	11,685,291,259					
X	XX	01 2 01	Nunukan	8 laporan	119,203,740					
X	XX	01 2 01	Nunukan	3 dokumen	47,505,240	APBD				

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nunukan	5 laporan	71,698,500	APBD			
X	XX	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan		5 Unit	8,770,000,000				
X	XX	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nunukan	50 orang	8,770,000,000	APBD			
X	XX	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian		5 unit	1,626,257,654				
					02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 paket	100,000,000	APBD			
X	XX	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nunukan	100 orang/kali	1,526,257,654	APBD			
X	XX	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perangkat daerah		5 Unit	759,490,865				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 paket	5,000,000	APBD			
X	XX	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nunukan	10 paket	400,000,000	APBD			
X	XX	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nunukan	11 paket	47,064,350	APBD			
X	XX	01	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nunukan	2 paket	7,698,515	APBD			
X	XX	01	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nunukan	20 laporan	299,728,000	APBD			
X	XX	01	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan		12	176,000,000				
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nunukan	2 unit	56,000,000	APBD			
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nunukan	1 unit		APBD			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
XX	01	2	07	11	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nunukan	12 unit	120,000,000	APBD			
X	XX	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	77,980,000				
X	XX	01	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	29,000,000	APBD			
X	XX	01	2	08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	500,000	APBD			
X	XX	01	2	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	48,480,000	APBD			
X	XX	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	25 unit	156,359,000				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nunukan	16 unit (7 unit roda empat, 9 unit roda dua)	149,992,000	APBD	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 unit	6,367,000	APBD	
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti		80%	2,412,328,810		
							Presentase pengaduan masyarakat yang tertindaklanjuti		100%			
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		196 laopran	1,808,665,810		
6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Nunukan	34 laopran	437,344,000	APBD	
					02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		5 laporan	95,000,000	APBD	
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	Nunukan	32 laporan	104,890,000	APBD	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	Nunukan	68 laporan	424,560,000	APBD		
6	01	02	2	01	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	Nunukan	56 laporan	478,511,810	APBD		
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Nunukan	14 dokumen	268,360,000	APBD		
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		15 laporan	603,663,000			
					01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		laporan	150,000,000	APBD		
6	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Nunukan	15 laporan	453,663,000	APBD		
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Manajemen Risiko		90%	926,848,000			
							Presentase PD yang berhasil dusulkan ke penilaian ZI Nasional		2%				

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		10 rekomendasi	100,000,000				
			01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		5 rekomendasi	50,000,000	APBD			
			02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		5 rekomendasi	50,000,000	APBD			
6	01	03	2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi		50 PD	826,848,000				
6	01	03	2	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nunukan	50 PD	275,674,000	APBD			
6	01	03	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nunukan	31 PD	246,132,000	APBD			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	01	03	2	02	03	Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nunukan	5 kegiatan	177,042,000	APBD		
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Nunukan	4 PD	128,000,000	APBD		
Jumlah										15,024,468,069			-

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan menyusun rencana kerja ini dengan menetapkan program dan kegiatan, lokasi, sasaran dan pagu indikatif, sehingga akhirnya terbentuk rencana kerja tahun 2026 dengan Tiga (tiga) program, yang dijabarkan 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan..

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini disusun dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja aparaturnya pengawasan.

Nunukan, 20 Mei 2025

Plt. Inspektur,


Pirdaus, S. Hut, M. AP
Pembina Tk. I
NIP.19710525 200112 1 004